

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

SINERGITAS PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI
LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan spesialis dan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan di desa yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, perlu adanya terobosan dalam pemberian layanan kesehatan;
- b. bahwa salah satu terobosan yang perlu diberikan dalam pemberian pelayanan kesehatan spesialis, adalah mensinergikan pemberian layanan kesehatan melalui pelayanan dokter spesialis keliling dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan daerah provinsi, Gubernur berwenang menetapkan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pelayanan Dokter Spesialis Keliling yang selanjutnya disebut SPELING adalah Layanan Dokter Spesialis Keliling yang dilakukan oleh Rumah Sakit pemerintah maupun swasta ke desa sasaran untuk mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat.
8. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa di Jawa Tengah.

9. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
10. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, serta layanan gawat darurat.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten/Kota adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan SPELING guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui kolaborasi guna menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC, penanganan lebih dini kasus Kanker Leher Rahim , menurunkan masalah Kesehatan jiwa, dan penanganan kasus Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular (PTM) lainnya melalui layanan dokter spesialis keliling.
- (2) Tujuan penyelenggaraan SPELING adalah :
 - a. mendekatkan layanan kesehatan spesialistik pada masyarakat;
 - b. meningkatkan kompetensi Dokter Umum, Perawat dan Bidan melalui *transfer of knowledge* dari Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi/Spesialis Paru/Spesialis Penyakit Dalam/Spesialis Anak/Spesialis Kesehatan Jiwa dan atau Spesialis lainnya,
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan medis melalui penegakan diagnostik yang lebih tepat dan akurat,
 - d. mempercepat penanganan kasus-kasus rujukan,
 - e. memperkuat sistem rujukan dan jejaring pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.
 - f. meningkatkan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Pasal 3

Ruang lingkup Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Speling meliputi:

- a. penyelenggaraan Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Speling, terkait peran :
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Rumah Sakit;
 4. Pemerintah Desa.
- b. pelaksanaan sinergitas melalui spelling
- c. monitoring dan evaluasi
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan
- e. Pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SINERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI SPELING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan Speling merupakan kebijakan Pemerintah Daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat.
- (2) Layanan spelling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan *Ante Natal Care* (ANC);
 - b. Skrining Kanker Leher Rahim dan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA);
 - c. Skrining dan pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM);
 - d. Skrining dan pemeriksaan *Tuberculosis* (TBC);
 - e. Skrining dan pemeriksaan kesehatan jiwa;
 - f. Pelayanan spesialistik lain sesuai kebutuhan masyarakat dan layanan unggulan Rumah Sakit.
- (3) Layanan spelling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Spesialis yang meliputi:
 - a. Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - b. Spesialis Penyakit Dalam/Paru;
 - c. Spesialis Jiwa dan Spesialis lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

Layanan Speling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksana Speling;

d. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Sinergitas peningkatan kesehatan masyarakat melalui speling oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Peran Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menetapkan desa sasaran lokasi speling;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Speling dengan rumah sakit Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Speling dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Speling dengan rumah sakit swasta;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan Speling dengan Puskesmas

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Sinergitas peningkatan kesehatan masyarakat melalui speling oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Sinergitas peningkatan kesehatan masyarakat melalui speling meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Speling dengan rumah sakit Kabupaten/Kota dan puskesmas;
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyiapkan sasaran;
 - c. membagi lokasi desa sesuai penetapan desa dari Pemerintah Daerah;
 - d. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Speling.

Bagian Keempat
Peran Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana Speling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. Rumah sakit;
 - b. Balai kesehatan masyarakat;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - b. Rumah sakit Daerah;
 - c. Rumah sakit Kabupaten/Kota;
 - d. Rumah sakit swasta.

- (3) Rumah sakit Daerah dan rumah sakit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- (4) Peran rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program Speling meliputi:
 - a. menyediakan tenaga pendukung khususnya Dokter Spesialis;
 - b. menyediakan alat kesehatan pendukung pelayanan;
 - c. menyediakan kebutuhan logistik lainnya;

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa wajib mendukung pelaksanaan kegiatan SPELING.
- (2) Dukungan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Melakukan sosialisasi program spelting kepada masyarakat;
 - b. Penyiapan lokasi pelaksanaan spelting;
 - c. memberdayakan kader kesehatan;
 - d. mengoordinasikan peserta kegiatan spelting.

BAB IV
PELAKSANAAN SINERGITAS MELALUI SPELING

Pasal 10

- (1) Program Speling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di desa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan desa sasaran dapat diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota
- (3) Desa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan desa miskin dan/atau desa dengan desa kurang sejahtera.
- (4) Lokasi pelaksanaan SPELING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau kelurahan setempat, atau tempat lain dengan prinsip mendekatkan layanan kepada masyarakat di desa

Pasal 11

Pelayanan SPELING diberikan secara terjadwal, terencana, dan berbasis pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat desa sasaran.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan spelting ini, dapat dilakukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah provinsi lainnya dan/atau Organisasi Masyarakat

- (2) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelaksana SPELING wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien.

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan menetapkan indikator mutu pelayanan untuk SPELING.
- (2) Rumah Sakit pelaksana wajib menjaga standar mutu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Speling di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara berkala.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Speling dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Speling di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam bentuk:
- Pelatihan;
 - asistensi teknis; dan
 - supervisi lapangan.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan dan pemantauan kegiatan serta pendokumentasian kegiatan.
- (2) Pelaporan kegiatan melalui pendataan hasil SPELING di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan pencatatan dan pelaporan sesuai pendekatan program.
- (3) Setiap pelaksana SPELING wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan SPELING bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- d. Dana operasional Rumah Sakit pelaksana;
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Teknis pelaksanaan Speling di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR